

Judul : Jumlah Warga Miskin Berkurang
Tanggal : Jumat, 16 Juli 2021
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 10

Jumlah Warga Miskin Berkurang

Program PEN berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin secara nasional. Namun demikian, penduduk miskin di perkotaan perlu dapat perhatian khusus.

M ILHAM RAMADHAN AVISENA
ilham@mediaindonesia.com

BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat menurunnya jumlah penduduk miskin dalam enam bulan terakhir.

Per Maret 2021, jumlah penduduk miskin tercatat 27,54 juta orang, turun 0,01 juta orang jika dibandingkan dengan September 2020 yang mencapai 27,55 juta orang atau 10,19% dari total penduduk.

"Kemiskinan di Maret 2021 ini secara persentase itu 10,14%. Ini turun 0,05% kalau dibandingkan dengan September 2020 yang sebesar 10,19%, tetapi lebih tinggi dari posisi Maret 2020 yang tercatat 9,78%," ujar Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuwono saat menyampaikan rilis secara virtual, kemarin.

Menurunnya jumlah penduduk miskin tersebut, sambungnya, tak lepas dari mulai pulihnya perekonomian akibat pandemi covid-19.

Dari 27,54 juta penduduk miskin tersebut, penurunan angka kemiskinan paling banyak terjadi di perdesaan. Dari 13,2% pada September 2020 menjadi 13,1% pada Maret 2021.

Sebaliknya di perkotaan, jumlah penduduk miskin justru naik, dari 7,88% di September 2020 menjadi 7,89% di Maret 2021.

"Penurunan di tingkat perdesaan lebih bagus. Ini menunjukkan bahwa berbagai program dana desa menunjukkan dampak pada penurunan penduduk miskin di desa," jelas Margo.

Dia menambahkan, BPS menggunakan pengeluaran rumah tangga sebesar Rp472.525 per kapita per bulan sebagai batas garis kemiskinan. Angka itu mengalami kenaikan sebesar 2,96% dari posisi September 2020 yang sebesar Rp458.947 per kapita per bulan.

"BPS mengateorikan penduduk miskin jika pengeluaran penduduk per kapita per bulan berada di bawah nilai tersebut," terang Margo.

Jumlah penduduk miskin yang menurun itu, lanjutnya, juga menurunkan rasio gini atau ketimpangan pengeluaran penduduk menjadi 0,384 dari 0,385 pada September 2020.

Margo menjelaskan rasio gini dengan nilai 0 sampai 1 menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk. Semakin mendekati 1, berarti pengeluaran penduduk semakin timpang.

Program PEN

Di kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah berhasil menahan pemburukan kesejahteraan masyarakat dari tekanan ekonomi akibat pandemi covid-19 di 2020. Itu karena bergulirnya program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang tak hanya menitikberatkan pada aspek kesehatan, tapi juga pada perlindungan sosial.

"Pemerintah memberi perhatian sangat besar, terutama melalui perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan rentan, serta dukungan insentif fiskal untuk membantu UMKM dan dunia usaha agar dapat bertahan dan kembali bangkit dari dampak pandemi," ujarnya dalam Rapat Paripurna DPR, kemarin.

Realisasi PEN 2020 tercatat Rp575,8 triliun, atau 82,83% dari pagu. Salah satu klaster yang realisasinya paling besar ialah program perlindungan sosial, yakni Rp216,6 triliun. Dari dukungan anggaran pemerintah itu, tingkat kemiskinan dan pengangguran di Indonesia dapat ditekan.

Tercatat, tingkat pengangguran terbuka berada di level 7,07% di 2020. Angka itu sejatinya mengalami kenaikan dari posisi 2019 sebesar 5,32%. Demikian halnya dengan tingkat kemiskinan yang berhasil ditahan di level 10,19%, naik sekitar 1% dari posisi 2019 sebesar 9,22%.

"Ketepatan sasaran dinilai membaik dengan terjadinya peningkatan inklusi keuangan penerima, adanya peningkatan kompetensi melalui program prakerja, serta bantuan subsidi kuota dan diskon listrik yang dapat dimanfaatkan dengan baik," pungkasnya. (E-2)